

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Konflik yang terjadi antara Thailand dan Kamboja berpusat di wilayah candi Preah Vihear dan merupakan konflik yang sudah berjalan sejak lama. Konflik ini berawal dari penetapan garis perbatasan hasil dari warisan kolonial Perjanjian Franco-Siamese 1904 dan 1907. Pada saat Perang Dunia II Thailand berhasil merebut wilayah yang menjadi sengketa tersebut dan termasuk wilayah yang berisi candi Preah Vihear. Kemudian pada tahun 1953, Thailand kembali menguasai wilayah candi Preah Vihear setelah Kamboja merdeka. Hal tersebut mengakibatkan sengketa wilayah candi dan kasus ini dibawa ke mahkamah internasional ICJ (International Court of Justice) (Teekah, 2026).

Ketegangan berlanjut hingga tahun 2008 sampai 2011 dimana dipicu oleh Kamboja yang mendaftarkan candi Preah Vihear sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO. Pemerintah Thailand merasa keberatan dengan hal tersebut karena lahan di sekitar candi merupakan milik Thailand. Hal ini menimbulkan aksi serangan antara kedua negara yang memperebutkan garis batas wilayah di sekitar candi (Ciorciari, 2025). Pada saat pertempuran meningkat, Kamboja kembali mengajukan permohonan agar ICJ menafsirkan keputusannya pada 15 Juni 1962 silam. Dilansir dari (UN News , 2013) bahwa pada 2013 ICJ memperkuat putusannya dengan mengonfirmasi kedaulatan Kamboja atas daerah sekitar candi Preah Vihear.

Konflik Thailand-Kamboja kembali meningkat pada tahun 2025 di bulan Mei. Hal ini diawali dengan adanya perselisihan di area Chong Bok di Provinsi Ubon Ratchathani. Chong Bok merupakan istilah untuk daerah sengketa yang digunakan sebagai rute dataran rendah ke dataran tinggi, maupun sebaliknya. Rute ini merupakan jalur kuno yang masih digunakan sampai sekarang yang dapat menghubungkan ke beberapa titik, salah satunya Distrik Choam Krasan, Provinsi Preah Vihear, Kamboja (The Nation, 2025). Kemudian adanya gambar yang menunjukkan tentara Kamboja memasuki batas bukit 745 yang merupakan sebuah daerah di Provinsi Ubon Ratchathani, Thailand. Hampir 100 tentara Kamboja terlihat di bukit 745, mereka menggali parit dan membuat pangkalan militer di sana. Hal ini mengakibatkan bentrokan kecil yang mengakibatkan tewasnya seorang tentara Kamboja (The Nation, 2025).

Tewasnya seorang tentara Kamboja memicu ketegangan antara kedua pihak. Pada tanggal 16 Mei tentara Thailand dikabarkan kehilangan kakinya akibat ledakan ranjau di Chong Bok, Provinsi Ubon Ratchathani. Kemudian pada 23 Juli, ledakan ranjau darat melukai lima tentara Thailand yang mengatakan sebagai ranjau dari pihak Kamboja (The Nation, 2025). Insiden ranjau tersebut menjadi pemantik puncak konflik yang terjadi pada 24 Juli dengan aksi tembakan selama lima hari beserta serangan udara dan roket di beberapa titik perbatasan. Aksi tersebut menewaskan puluhan orang dan lebih dari 300.000 orang diungsikan (CNN World, 2025).

Konflik ini dengan cepat meluas ke berbagai wilayah, salah satunya adalah Provinsi Preah Vihear. Dimana pada saat itu Thailand merespon serangan

Kamboja dengan mengerahkan jet F-16 dan drone untuk melancarkan serangan udara dan menargetkan tembakannya ke militer Kamboja, termasuk kawasan Candi Preah Vihear yang merupakan wilayah sengketa. Pada 28 Juli 2025, ada upaya gencatan senjata untuk menghentikan perang di perbatasan Thailand-Kamboja yang dipimpin oleh Malaysia. Perundingan ini juga melibatkan Amerika Serikat dan Tiongkok. Namun, ledakan ranjau kembali terjadi pada bulan November yang menyebabkan Thailand menghentikan implementasi gencatan senjata. Hal tersebut memicu pertempuran baru pada 7 Desember 2025. Penandatanganan gencatan senjata kedua dilakukan pada 27 Desember, namun ketidakpercayaan masih sangat tinggi karena adanya tuduhan saling serang dan penggunaan senjata berat (Ma & Xu, 2025).

Konflik Thailand-Kamboja yang terjadi di Provinsi Ubon Ratchathani dan Provinsi Preah Vihear ini mengakibatkan dampak yang cukup besar bagi masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah konflik. Kerusakan pada pemukiman warga sipil di Nam Yuen, Provinsi Ubon Ratchathani terbukti sangat parah. Seorang warga harus kehilangan rumahnya disebabkan serangan roket pada tanggal 25 Juli. Warga yang kehilangan rumah mereka harus mengungsi dan berlindung di tempat pengungsian. Serangan roket tak hanya menghancurkan sebuah bangunan, tetapi juga merenggut nyawa warga sipil yang sedang beraktivitas. Konflik yang masih berlanjut ini mengakibatkan terhambatnya upaya untuk mengembalikan 20.000 warga yang mengungsi kembali ke rumah mereka di Provinsi Ubon Ratchathani (Nachemson, 2025).

Adanya dampak konflik Thailand-Kamboja di wilayah Provinsi Ubon Ratchathani dan Provinsi Preah Vihear ini dapat menggeser perhatian dari keamanan nasional ke human insecurity di mana eskalasi konflik bersenjata di perbatasan kedua negara tersebut telah menimbulkan ancaman yang meluas ke beberapa dimensi human insecurity seperti ekonomi, lingkungan, dan kesehatan. Dalam dimensi ketidakamanan ekonomi, konflik perbatasan ini menyebabkan menurunnya PDB Kamboja dari sekitar 1,2 juta pekerja migran Kamboja yang sebelumnya bekerja di Thailand, diperkirakan 0,9 juta telah meninggalkan Thailand sejak Juni 2025, mengancam arus remitansi yang selama ini berkontribusi hingga 5,6 persen PDB Kamboja (AMRO, 2025).

Dampak konflik di perbatasan ini mulai melebar, konflik ini berdampak munculnya ketidakamanan pangan, lingkungan, serta kesehatan. Kamboja melaporkan jumlah kasus campak dan korela terkonfirmasi dari tanggal 1 Januari sampai 11 Desember 2025 mencapai 4540 kasus yang tersebar ke 25 Provinsi. Sedangkan Provinsi Preah Vihear melaporkan kasus campak terbanyak pada bulan September. Hal ini disebabkan dari beberapa faktor seperti kurangnya pasokan makanan, air dan sanitasi bersih di pengungsian, dan banyaknya anak yang belum melakukan imunisasi dan vaksin. Tak hanya itu, di daerah perbatasan Kamboja juga dilaporkan adanya malnutrisi terhadap anak akibat konflik perbatasan ini (World Health Organization, 2025).

Selanjutnya terkait penelitian terdahulu, terdapat penelitian yang berjudul "Evaluasi Peran ASEAN Dalam Menangani Konflik antara Thailand dan Kamboja Tahun 2025" ini menggunakan teori resolusi konflik oleh Johan

Galtung. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran ASEAN cukup penting dalam konflik Thailand dan Kamboja sebagai mediator serta fasilitator damai. Namun upaya ASEAN ini tidak mudah karena terhambat dengan adanya prinsip non-intervensi yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan damai secara struktural. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan penciptaan mekanisme resolusi konflik baru agar ASEAN dapat menciptakan perdamaian yang berkelanjutan di Asia Tenggara (Tokan, Lape, & Subandi, 2026).

Dalam penelitian lain yang berjudul "The 2025 Thai-Cambodian Conflict Viewed Through Glasl's Nine-Stage Conflict Escalation Model" yang ditulis oleh STS ini mengkaji konflik perbatasan Thailand-Kamboja 2025 melalui sembilan tahap model eskalasi Friedrich Glasl. Penelitian ini menganalisis perkembangan ketegangan konflik dengan memetakan garis waktu konflik melalui fase rasional, fase emosional dan pertempuran sampai dengan puncak konflik. Penelitian ini juga menjelaskan adanya keterbatasan model dalam membedah faktor geopolitik dan sosio-ekonomi dalam konflik.

Selanjutnya, menurut (Alam, Rahmawati, Balqis, & Subandi, 2026) dalam penelitiannya yang berjudul "Militerisasi Perbatasan dan Dampaknya Terhadap Stabilitas Kawasan: Studi Kasus Thailand - Kamboja", penelitian ini menggunakan teori *Regional Security Complex* (RSCT) oleh Barry Buzan dan Ole Waever untuk mengkaji bagaimana isu keamanan bersifat geografis dan saling terkait antar negara di kawasan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa militerisasi perbatasan tidak hanya sebagai alat defensif, tetapi juga

menimbulkan *security dilemma* dan kecurigaan antar negara sehingga meningkatkan konflik. Hal ini mengakibatkan dampak yang negatif terhadap stabilitas keamanan Asia Tenggara dan menghambat peran ASEAN dalam menyelesaikan konflik secara damai.

Berdasarkan tinjauan pustaka dari ketiga penelitian di atas, terdapat adanya gap penelitian. Dalam penelitian sebelumnya belum ada yang membahas dampak konflik Thailand-Kamboja di provinsi Ubon Ratchathani dan Provinsi Preah Vihear tahun 2025 terhadap Human Insecurity. Penelitian ini akan fokus membahas apa saja dampak konflik perbatasan yang terjadi di wilayah Provinsi Ubon Ratchathani dan Provinsi Preah Vihear tahun 2025 dengan menggunakan empat indeks dimensi Human Insecurity yaitu, ketidakamanan ekonomi, pangan, lingkungan, dan kesehatan. Penelitian ini diharapkan menjadi sebuah pembaruan dalam pemahaman tentang topik yang diteliti, serta memberikan kontribusi baru bagi ilmu pengetahuan.

1.2 Rumusan Masalah

berdasarkan latar belakang masalah dan tinjauan pustaka di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apa saja dampak konflik Thailand-Kamboja terhadap Human Insecurity di Provinsi Ubon Ratchathani dan Provinsi Preah Vihear tahun 2025?”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk mencapai gelar sarjana S1 pada Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu

Sosial, Budaya dan Politik di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”
Jawa Timur.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk meneliti dampak apa saja yang disebabkan oleh konflik Thailand-Kamboja di wilayah Provinsi Ubon Ratchathani dan Provinsi Preah Vihear tahun 2025 dengan menggunakan indeks indikator dari Human Insecurity.

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 Konflik Bilateral

Menurut (Pruitt & Rubin, 1986) konflik merupakan suatu perbedaan kepentingan yang dirasakan atau sebuah keyakinan bahwa aspirasi para pihak tidak dapat dicapai secara bersamaan. Dalam konsep konflik bilateral didefinisikan sebagai perselisihan atau pertentangan yang dilakukan oleh dua negara. Konflik ini bisa berkembang menjadi semakin memburuk karena siklus tindakan dan respons yang saling memperparah dan mengakibatkan perpanjangan konflik. Konflik dapat berakhir dengan penyelesaian melalui negosiasi langsung yang mengutamakan pemenuhan kepentingan kedua pihak secara bersama-sama.

Konflik bilateral sering kali terjadi karena kedua negara saling bergantung dalam berbagai bidang. Bergantung dalam hal ini dimaksudkan dimana kedua belah pihak memperebutkan suatu hal. Konflik bilateral dikatakan sebagai fenomena yang dapat mengancam stabilitas global apabila tidak ada ruang untuk penyelesaian dengan keterlibatan sistematis

bagi hubungan internasional. Dalam konflik bilateral, pengelolaan yang buruk dapat mengubah konflik menjadi ancaman yang serius. Sehingga dibutuhkan strategi penyelesaian konflik yang strategis untuk mencegah eskalasi lebih lanjut.

1.4.2 Human Insecurity

Human insecurity menurut (Werthes, Heaven, & Vollnhals, 2011) merupakan sebuah pendekatan yang berfokus pada ancaman terhadap kehidupan, mata pencaharian, dan martabat manusia di berbagai dimensi. Konsep *human insecurity* ini dikembangkan dari kerangka *human security* UNDP 1994. *Human insecurity* ini dikatakan sebagai kebalikannya *human security* dimana kondisi individu dan komunitas menghadapi ancaman yang mengganggu kelangsungan hidup mereka.

Konsep *human insecurity* ini dibuat untuk mengkritik *konsep human security* yang dinilai terlalu luas dan konseptualnya lemah atau kurangnya definisi yang jelas sehingga sulit untuk diukur. Konsep ini juga diusulkan dengan berbasis ambang batas (*Threshold*) untuk membedakan tingkat *human security* dan *insecurity*. Salah satu cara untuk membedakan hal itu adalah dengan menciptakan indeks *human insecurity* yang mencerminkan gagasan konseptual. Indeks ini dibangun untuk mengoperasikan indikator spesifik per dimensi dan membantu mengidentifikasi masalah *human insecurity* dengan hak asasi manusia *human development* (Werthes, Heaven, & Vollnhals, 2011).

Dalam *human insecurity* index ada modifikasi dimensi dan indikator yang dilakukan. Setiap dimensi dapat diukur menggunakan indikator yang lebih terstruktur dalam pengaplikasiannya. Konsep *human insecurity* ini tidak hanya menjadi alat akademis, tetapi juga dapat menjadi instrumen yang mengubah konsep *human security* menjadi suatu alat yang dapat diukur dan digunakan untuk membuat kebijakan yang lebih baik (Werthes, Heaven, & Vollnhals, 2011).

1.4.2.1 Ketidakamanan Ekonomi

Ketidakamanan ekonomi dikatakan sebagai salah satu dimensi utama dalam *human insecurity* yang menggambarkan ancaman terhadap mata pencaharian dan akses terhadap sumber daya untuk individu dan kelompok. Dimensi ini mencakup kerentanan akibat pengangguran, ketidaksetaraan akses pasar, dan kurangnya jaminan sosial dan ekonomi yang sama. Ketika ambang batas ketidakmampuan ekonomi tinggi akan mengakibatkan individu sulit untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

Dalam *human insecurity* ini, keamanan ekonomi dapat diwujudkan dengan menggunakan dua indikator ini yaitu, Produk Domestik Bruto per Kapita, dan BTI (Bertelsmann Transformation Index) yang dikombinasi dengan jaringan pengamatan sosial dan kesempatan yang setara. Indikator pertama dipilih karena menggambarkan kinerja ekonomi keseluruhan suatu negara yang memungkinkan perbandingan internasional. Indikator ini dipilih sebagai pengganti angka pengangguran karena definisi pengangguran sangat bervariasi di berbagai negara, yang membuat

perbandingan internasional menjadi sangat sulit. Kemudian indikator jaringan pengaman sosial dan kesempatan yang Sama merupakan bagian dari Indeks Status yang berkaitan dengan keadaan ekonomi pasar di suatu negara dan merupakan bagian dari sub-kriteria negara kesejahteraan (Werthes, Heaven, & Vollnhals, 2011).

1.4.2.2 Ketidakamanan Pangan

Ketidakamanan pangan menurut (Werthes, Heaven, & Vollnhals, 2011) adalah kondisi dimana individu dan kelompok tidak hanya memperlakukan ketersediaan makanan yang kurang tetapi juga tentang akses terhadap makanan pokok. Hal ini dapat dilihat oleh distribusi yang tidak merata dan kurangnya daya beli sehingga memungkinkan terjadinya kekurangan gizi. Anak-anak yang menderita kekurangan gizi akibat pola makan yang buruk lebih rentan terhadap penyakit dan kematian, kekurangan gizi juga mempengaruhi perkembangan kognitif dan status kesehatan mereka di kemudian hari.

Oleh karena itu ketahanan pangan dalam index *human insecurity* ini diukur dengan jumlah anak yang kekurangan gizi di bawah lima tahun, dan persentase total penduduk yang kekurangan gizi. Pengukuran kekurangan gizi pada anak diakui secara internasional sebagai cara untuk memperkirakan status gizi dan kesehatan populasi secara umum. Terlebih lagi, kekurangan gizi pada anak berkaitan dengan beberapa faktor lain seperti kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, dan akses terbatas terhadap pelayanan kesehatan. Selain itu, persentase populasi yang

kekurangan gizi memberikan gambaran keseluruhan tentang kerentanan manusia terkait dengan ketahanan pangan.

1.4.2.3 Ketidakamanan Kesehatan

Ketidakamanan kesehatan berkaitan erat dengan dimensi keamanan kesehatan yang ditujukan untuk perlindungan dari penyebab utama kematian. Penularan penyakit dan parasit menjadi faktor utama di dimensi ini. Sebagian besar kematian diakibatkan oleh penyakit menular dan berkaitan dengan kekurangan gizi dan air yang tercemar. Epidemio juga dapat mempengaruhi fungsi masyarakat, karena kesehatan yang buruk dapat menjadi penyebab langsung kemiskinan.

Masalah penyakit menular tidak lagi dapat dianggap sebagai masalah medis semata, tetapi juga harus dikaitkan dengan masalah keamanan. Karakter lintas batas penyakit menular meningkatkan pentingnya penerapan strategi yang efisien untuk mengatasi berlanjutan kehilangan nyawa manusia. Hal tersebut membuat sebuah kekhawatiran yang sangat penting terutama karena infeksi penyakit-penyakit tersebut sebenarnya dapat dicegah.

Dalam index *human insecurity* dimensi ini dapat diukur menggunakan indikator jumlah total penduduk yang terdampak penyakit menular, dan tingkat kematian anak. Jumlah total penduduk yang terdampak penyakit menggambarkan kasus-kasus yang disebutkan di atas dan menunjukkan betapa rentannya individu terhadap penyakit menular. Selain itu, pengukuran angka kematian anak merupakan salah satu indikator utama

untuk tingkat kesehatan anak dan pembangunan secara keseluruhan di suatu negara (Werthes, Heaven, & Vollnhals, 2011).

1.4.2.4 Ketidakamanan Lingkungan

Menurut (Werthes, Heaven, & Vollnhals, 2011) ketidakamanan lingkungan menyoroti ancaman yang bersifat mendadak maupun jangka panjang akibat degradasi alam dan bencana. Ancaman paling utama dimensi ini adalah bencana alam yang dapat melumpuhkan aktivitas manusia. Bencana alam seperti gempa, banjir, Kekeringan atau kebakaran hutan merupakan risiko besar lainnya bagi kesejahteraan dan keamanan umat manusia.

Index human insecurity dalam dimensi ketidakamanan dapat dilihat dari indikator persentase populasi yang terdampak bencana, dan persentase penduduk yang memiliki akses ke air bersih dan sanitasi air yang baik. Indikator pertama menunjukkan persentase penduduk yang terkena dampak bencana, seperti banjir atau gempa bumi, dan sangat penting karena membantu menggambarkan gambaran yang lebih luas yang disebabkan oleh bencana lingkungan. Kemudian akses terhadap air bersih dan akses terhadap sanitasi air yang lebih baik, kedua faktor tersebut sangat terkait dengan peningkatan kondisi lingkungan.

1.4.2.5 Ketidakamanan Individu dan Komunitas

Ketidakamanan individu ialah kondisi dimana ancaman yang berasal dari negara (penyiksaan fisik), dari negara lain (perang), dari kelompok orang lain (konflik etnis), dari individu (kejahatan atau kekerasan

jalanan), dapat ditujukan kepada perempuan (pemeriksaan atau kekerasan dalam rumah tangga), dan ancaman terhadap diri sendiri seperti narkoba atau bunuh diri. Sedangkan ketidakamanan komunitas merujuk ke kondisi suatu kelompok terancam oleh kelompok lain.

Index human insecurity dalam ketidakamanan individu dan komunitas dapat dilihat dengan dua indikator yaitu, jumlah total orang yang dibantu oleh UNHCR, dan skala teror politik. Skala teror politik dapat diukur dengan menggunakan dua jenis sumber, yaitu Laporan Negara tahunan Amnesty Internasional dan Laporan Negara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat tentang Praktik Hak Asasi Manusia. Indikator skala teror politik ini mengukur pelanggaran hak integritas fisik daripada represi politik umum, oleh karena itu indikator ini dipilih untuk mengoperasionalkan keamanan pribadi. Selanjutnya (Werthes, Heaven, & Vollnhals, 2011) melihat dimensi ini sebagai faktor penting yang mempengaruhi rasa aman sehari-hari dan kemampuan komunitas untuk bertahan serta berkembang.

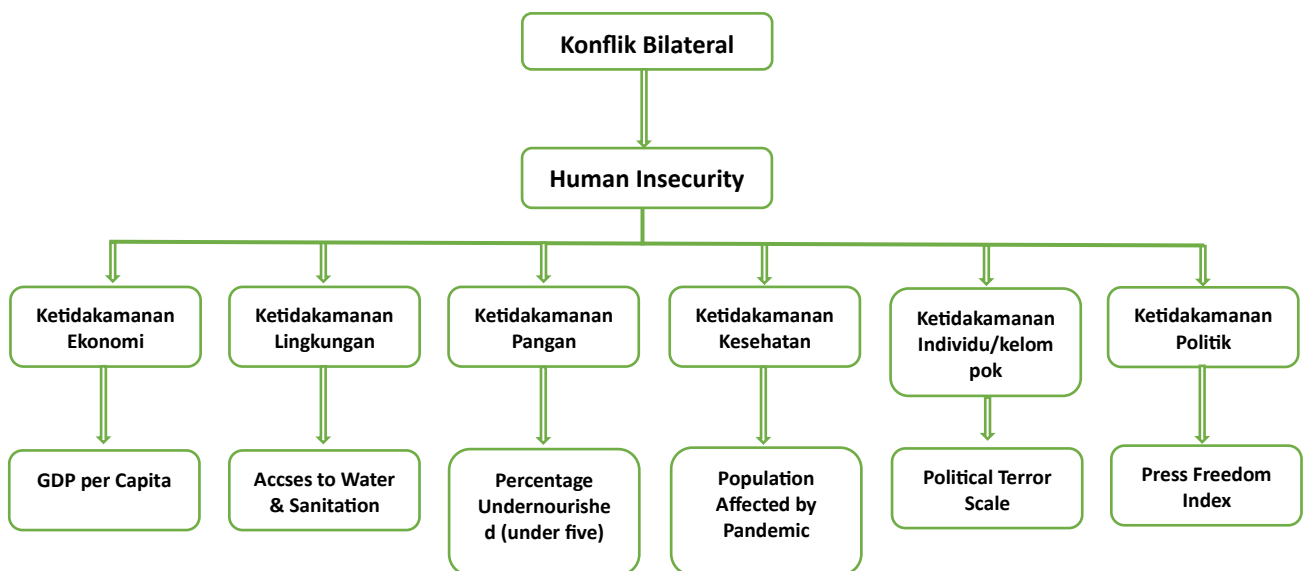
1.4.2.6 Ketidakamanan Politik

Ketidakamanan politik menurut (Werthes, Heaven, & Vollnhals, 2011) menggambarkan kurangnya perlindungan terhadap hak-hak sipil dan politik, termasuk penindasan, pelanggaran hak asasi manusia, serta ketidakstabilan tata kelola pemerintahan. Salah satu kekhawatiran utama hingga saat ini adalah melindungi masyarakat dari represi negara.

Kemudian, kebebasan pers juga merupakan salah satu hak yang paling penting dan sangat indikatif untuk dimensi keamanan manusia ini.

Index human insecurity dalam dimensi ketidakamanan politik dapat dilihat dari dua indikator yaitu, indikator tentang keamanan pribadi (CIRI Human Right project), dan kebebasan pers. Indikator dari CIRI Human Right project dapat diuraikan menjadi, penghilangan paksa, pembunuhan di Luar proses Hukum, pemenjaraan politik, penyiksaan, dan pembunuhan. Dimensi ini menunjukkan bagaimana represi politik dan konflik kekuasaan dapat memperburuk kerentanan individu, menghambat partisipasi, serta memperlemah institusi yang seharusnya melindungi warga negara.

1.5 Sintesa Pemikiran



Sintesa pemikiran dalam penelitian ini menggunakan konsep Human Insecurity dari Werthes, Surga, dan Vollnhals untuk meneliti dampak konflik

bilateral antara Thailand-Kamboja di wilayah Provinsi Ubon Ratchathani dan Provinsi Preah Vihear tahun 2025. Dampak konflik dilihat melalui dimensi dari Human Insecurity yaitu, ketidakamanan ekonomi, ketidakamanan lingkungan, ketidakamanan pangan, ketidakamanan kesehatan, dan ketidakamanan individu & kelompok. Kemudian konflik Thailand-Kamboja di wilayah Provinsi Ubon Ratchathani dan Provinsi Preah Vihear tahun 2025 ini diteliti menggunakan indikator Human Insecurity index seperti GDP per capita, access to water and sanitation, percentage undernourished (under five), Population affected by Pandemics, Political terror scale, dan Press Freedom Index.

1.6 Argumen Utama

Dalam penelitian ini, penulis berargumen bahwa konflik Thailand-Kamboja di wilayah Provinsi Ubon Ratchathani dan Preah Vihear ini menyebabkan adanya ketidakamanan manusia atau Human Insecurity. Dampak dari konflik perbatasan ini menimbulkan human insecurity di beberapa dimensi. Dimensi pertama yaitu ketidakamanan ekonomi, konflik ini menghambat segala aktivitas warga di berbagai daerah perbatasan. Indikator ekonomi dapat dilihat dari menurunnya PDB Kamboja dikarenakan beberapa faktor akibat konflik, salah satunya adalah penarikan pekerja Kamboja di Thailand. Provinsi Preah Vihear termasuk dalam wilayah yang menyumbang banyak pekerja di Thailand.

Selanjutnya pada dimensi lingkungan, dampak dari konflik perbatasan ini mengakibatkan kekurangan air bersih dan sanitasi. Berdasarkan laporan dari wilayah Provinsi Preah Vihear, kondisi air, sanitasi, dan kebersihan sangat tidak

memadai di lokasi pengungsian. Daerah perbatasan yang terdampak konflik menjadi daerah yang paling membutuhkan bantuan air dan sanitasi yang bersih. Dimensi ketiga yaitu ketidakamanan pangan. Index dimensi ketidakamanan pangan dalam Human Insecurity ini adalah adanya malnutrisi pada anak di bawah umur lima tahun. Sebagian besar warga perbatasan mengalami kesulitan karena kurangnya pasokan pangan. Pasokan pangan di pengungsian ini mempengaruhi tumbuh kembang anak-anak. Di wilayah Provinsi Preah Vihear menunjukkan kurangnya mikronutrien, serta adanya terdapat peningkatan 10% malnutrisi pada anak di bawah lima tahun.

Kemudian dimensi keempat yakni ketidakamanan kesehatan. Preah Vihear sebagai tempat pengungsian terbanyak mengalami banyak kekurangan bantuan. Salah satu kurangnya bantuan pada pengungsi ialah banyaknya anak yang belum melakukan imunisasi dan vaksin sehingga penyakit menular dengan cepat menyebar. Penyakit menular yang teridentifikasi di daerah pengungsian adalah campak dan kolera. Dimensi kelima adalah ketidakamanan individu dan kelompok. Konflik ini menyebabkan puluhan hingga ratusan ribu orang mengungsi dan kehilangan nyawa. Di Provinsi Ubon Ratchathani menunjukkan sekitar 20.000 warga yang gagal kembali ke rumah karena konflik yang masih memanas. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pelanggaran terhadap integrasi fisik individu dan kelompok. Dimensi keenam yaitu ketidakamanan politik, dimana konflik ini telah menyebabkan adanya kasus kebebasan pers di kedua negara.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan secara mendalam suatu fenomena, peristiwa, atau kondisi sosial secara alamiah tanpa melakukan manipulasi variabel atau mencari hubungan sebab-akibat (Sukmadinata, 2020). Penelitian ini berfokus pada menjelaskan fenomena tertentu dengan mendeskripsikan suatu studi kasus secara jelas. Penulis menggunakan penelitian deskriptif kualitatif untuk menjelaskan atau mendeskripsikan studi kasus konflik Thailand-Kamboja di wilayah Provinsi Ubon Ratchathani dan Preah Vihear tahun 2025 dengan menggunakan konsep Human Insecurity .

1.7.2 Jangkauan Waktu Penelitian

Penelitian ini membatasi kajiannya pada studi kasus konflik perbatasan di wilayah Provinsi Ubon Ratchathani dan Provinsi Preah Vihear pada tahun 2025 karena periode tersebut merupakan eskalasi terbaru. Konflik pada tahun 2008 - 2011 memang menjadi latar belakang historis yang penting, namun eskalasi pada tahun 2025 memiliki dinamik yang relevan dengan konsep Human Insecurity. Dengan membatasi pada tahun 2025 penelitian ini dapat melakukan analisis yang mendalam, aktual dan terbaru.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sekunder dengan menggunakan *case study*. Menurut (Yin, 2017) *case study* adalah metode penelitian yang mendalam tentang suatu fenomena dalam konteks kehidupan nyata. Teknik analisisnya meliputi pengumpulan data dari berbagai sumber untuk memperkuat validitas temuan. Tipe pengumpulan data sekunder dengan menggunakan studi kasus merujuk pada metode penelitian dimana peneliti menganalisis informasi yang sudah ada sebelumnya untuk mendapatkan wawasan tentang fenomena tertentu. Dalam konteks ini, studi kasus bisa melibatkan analisis dokumen, artikel, web resmi, laporan, maupun jurnal ilmiah. Data sekunder ini digunakan untuk memberikan konteks, mendukung argumen, atau memperkuat temuan dalam penelitian yang sedang dilakukan.

1.7.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah metode analisis kualitatif. Menurut (Creswell & Creswell, 2018) Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data non-numerik untuk memahami konsep, pikiran, atau pengalaman. Dalam penelitian kualitatif, pemilihan teknik analisis data sangat penting untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat memberikan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data non-numerik, seperti wawancara, observasi, dan dokumen, untuk memahami konsep, pikiran, atau pengalaman individu atau kelompok. Metode ini bertujuan

untuk menggali makna yang mendalam di balik fenomena sosial, memberikan wawasan tentang perspektif subjektif responden, serta mengungkap pola-pola yang mungkin tidak terlihat melalui pendekatan kuantitatif. Data dari berbagai website resmi dan artikel yang berhubungan dengan konflik perbatasan di wilayah Provinsi Ubon Ratchathani dan Provinsi Preah Vihear akan dijadikan untuk mengkaji bagaimana dampak konflik terhadap human insecurity.

1.7.5 Sistematika Penulisan

BAB I : Berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, sintesa pemikiran, argumen utama dan metodologi penelitian.

BAB II : Membahas dampak dari konflik Thailand-Kamboja di wilayah Provinsi Ubon Ratchathani dan provinsi Preah Vihear tahun 2025 dengan menggunakan index dari Human Insecurity pada dimensi ketidakamanan ekonomi, ketidakamanan lingkungan, dan ketidakamanan pangan.

BAB III : Membahas dampak dari konflik Thailand-Kamboja di wilayah Provinsi Ubon Ratchathani dan provinsi Preah Vihear tahun 2025 dengan menggunakan index dari Human Insecurity pada dimensi ketidakamanan kesehatan, ketidakamanan individu & kelompok, dan ketidakamanan politik.

BAB IV : Berisi penutup penelitian yang di dalamnya akan terdapat kesimpulan dan saran, serta pembuktian argumentasi dasar yang ditulis dalam penelitian ini.